

# PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN DAN LARANGAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 261/PDT.G/2016/PN DPS) = Violation of Obligations and Prohibition of Position Conducted by Notaries in Making Authentic Deeds (Case Study of Denpasar Court Decision Number 261/Pdt.G/2016/PN Dps)

Nur Afni Hidayanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920531678&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Undang–Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai Kewajiban dan Larangan Notaris, namun sampai saat ini masih ada Notaris yang dalam menjalankan kewenangannya telah mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Dps, dimana pelapor berinisial YS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial PH. Pelapor melaporkan tindakan Notaris PH yang diduga melakukan tindakan tidak profesional dalam proses pembuatan akta autentik tersebut kepada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Menurut pelapor Notaris PH telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris terkait tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang dibuat oleh Notaris PH serta melanggar kewajiban Notaris yakni tidak laksanakannya pembacaan Akta di depan para penghadap dan dalam proses pembuatan akta tersebut Notaris PH terlihat memihak kepada salah pihak. Oleh karenanya, dalam tesis ini permasalahan yang akan di angkat adalah mengenai akibat hukum terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan dan berpihak kepada salah satu pihak, dan tanggung jawan Notaris terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan di depan para penghadap dan memihak kepada salah satu pihak sesuai dengan UUJN. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normative, tipologi penelitian ekplanatoris, dan jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, pengumpulan data dengan studi dokumen, metode analisis kualitatif serta bentuk hasil penelitian kualitatif. Akibat hukum terhadap akta yang tidak di bacakan oleh notaris di depan para penghadap dan berpihak kepada salah satu pihak memiliki pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi dengan adanya unsur kebohongan maka akta batal demi hukum. Sedangkan terhadap tanggung jawab Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban pembacaan akta di depan para penghadap dan berpihak kepada salah satu pihak yang tidak sesuai dengan UUJN, dapat dikenakan tanggung jawab dan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi Kode Etik Notaris.

.....The Law on Notary Positions (UUJN) has regulated the Obligations and Prohibitions of Notaries, but until now there are still Notaries who in carrying out their authority have ignored these obligations and prohibitions. This can be seen in Decision Number 261/Pdt.G/2016/PN Dps, where the complainant with the initial YS feels aggrieved by the actions of a Notary with the initials PH. The Whistleblower reports the actions of the Notary PH who are suspected of committing unprofessional actions in the process of making the authentic deed to the Denpasar District Court, Bali. According to the reporter, Notary PH has violated the implementation of the position of a Notary related to the non-fulfillment of the legal requirements of the agreement made by Notary PH and violated the obligations of the Notary, namely not carrying out the reading of the Deed in front of the parties and in the process of making the deed, the Notary PH seemed to

be in favor of one party. Therefore, in this thesis the problem to be raised is regarding the legal consequences of the deed whose preparation was not read out and sided with one of the parties, and the responsibility of the Notary to the deed whose preparation was not read in front of the parties and sided with one of the parties in accordance with UUJN. This study uses a normative juridical form, typology of explanatory research, and the type of data used is secondary data, data collection by document study, qualitative analysis methods and the form of qualitative research results. The legal consequences of a deed that is not read by a notary in front of the parties and sided with one of the parties have proof as an underhand deed, but with the element of lying, the deed is null and void. Meanwhile, the responsibility of a Notary who does not carry out the obligation to read the deed in front of the appearers and sided with one of the parties that is not in accordance with the UUJN, may be subject to responsibilities and sanctions in the form of civil sanctions, administrative sanctions, criminal sanctions and sanctions for the Notary Code of Ethics.